DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. (Batu: Bayumedia Publishing, 2004).

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).

Harjono, Sutrisno Prawiro. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1982).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: Rajwali Pers, 2008).

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan.* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global).* (Bandung: Rineka Cipta, 2002).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-9, Edisi Revisi.* (Jakarta: Kencana, 2016).

Negara, Tunggu Anshari Setia. *Pengantar Hukum Pajak.* (Batu: Bayumedia Publishing, 2008).

Nurmanu, Safri. *Pengantar Perpajakan.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

Siahaan, Mariot Pahala. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori & Praktek).* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2001).

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Cetakan ke-4*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah.* (Jakarta: Republika, 2008).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015).

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).* Cetakan ke-41. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014).

_____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).*

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3998).*

_____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118).*

_____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).*

_____. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).*

_____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).*

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan.*

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.*

_____. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.*

_____. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan.*

_____. *Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Tanggal 11 Maret 2011 Nomor 1/B).*

_____. *Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B).*

_____. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11).*

_____. *Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tata Pembayaran BPHTB.*

_____. *Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian Pemeriksaan BPHTB.*

_____. *Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan BPHTB.*

C. Jurnal

Diamastuti, Erlina. *"Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak : Potret Self Assessment System"*. No. 80/DIKTI/Kep/2012, Volume 20 No. 3 Tahun 2016.

Parwati, Ni Made Suwitri. *"The Effect of Self Assessment System and Fraud Detection Posibility Toward Tax Evasion Behavior". International Journal of Mechanical Engineering and Technology*. Volume 8 Issue 8 Tahun 2017.

Terrefe, Muluge. *"A Close Scrutiny of Self-Assessment System and Its Impact on The Tax Compliance Level of Taxpayers: The Case of Wolaita Zone". American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences.* Volume 20 No. 1 Tahun 2016.

Widjiastuti, Agustin. *"Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN"*. Perspektif. Volume 22 No. 2 Tahun 2017.

D. Artikel Internet

Ade Herawanto. "DPRD Kota Malang Setujui Perubahan Perda Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan". http://suryamalang.tribunnews.com/2018/10/15/dprd-kota-malang-setujui-perubahan-perda-tentang-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan. 3 Januari 2019.